



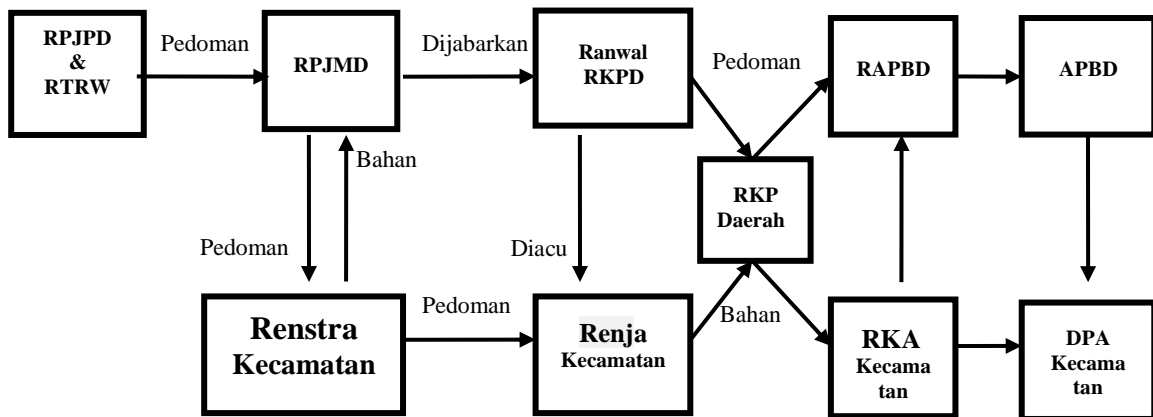
Malang Nomor: 188.45/988/25.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/597/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Wagir Tahun 2016-2021, Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Wagir dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor:050/7534/35.07.02.202/2018, hal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Edaran Bupati Malang tanggal 08 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019, hal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wagir Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wagir Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wagir untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Wagir Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/988/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/597/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/318/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Wagir Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Wagir Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAGAK TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Wagir
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wagir
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wagir
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN WAGIR.**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pagak

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WAGIR**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN WAGIR**  
**TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Wagir**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Wagir terdiri dari 6 (enam) Program dan 26 (duapuluh enam).

Adapun 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Wagir, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Wagir dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan

Permasalahan yang ada Kecamatan Wagir dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan

Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Tahun 2019 Kecamatan Wagir melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan kedua tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 60 %. Sedangkan perkiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan sampai akhir tahun 2019 dapat tercapai 100 %.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019**  
**Kecamatan Wagir**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>	100%	100%	100 %	100 %	100 %	60%	260%	260%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat Masuk dan Keluar	1000 buah	400 buah	117 buah	117 buah	100 %	60 buah	577 buah	5,77%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	60 Bulan	24 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	6 Bulan	42 Bulan	0,7%
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	276 OB	96 OB	96 OB	96 OB	100 %	46 OB	238 OB	0,86 %
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	44 OB	20 OB	12 OB	12 OB	100 %	6 OB	38 OB	86,3 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan	64 unit	16 unit	10 unit	10 unit	100 %	3 unit	29 unit	45,3 %
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	180 jenis	72 jenis	25 jenis	25 jenis	100 %	22 jenis	119 jenis	66,1 %
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	8 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	20 jenis	100 %
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat - alat listrik dan elektronik	60 jenis	24 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	27 jenis	45 %
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	8 jenis	2 jenis	27 jenis	27 jenis	100%	16 jenis	45 jenis	562,5%
1.10	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan yang dibeli	8 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	4 jenis	50 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	1200 hok	480 hok	1950 hok	1950 hok	100 %	616 hok	3046 hok	253,8%
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	2150 hok	860 hok	292 hok	292 hok	100 %	146 hok	1298 hok	60,3%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur</b>	100%	100%	100%	100%	100 %	60 %	260 %	260%
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara rutin/berkala	5 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	4 jenis	8 jenis
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	6 unit	300%
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	36 jenis	9 jenis	1 jenis	0	0	0	9 jenis	25 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	3 unit	300 %
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	300 %
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	52 orang	16 orang	12 orang	12 orang	100 %	0	28 orang	53,8 %
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	300 %
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja PD dan ihtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja LKJ-P, profile kinerja PD, Survey Kepuasan Masyarakat	69 buku	24 buku	100 buku	6 buku	100%	6 buku	36 buku	52.1%
5	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase penunjang kerja aparatur</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
5.1	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	272 stel	68 stel	57 stel	57 stel	100%	19 stel	144 stel	52,9%
6	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>60 %</b>	<b>260%</b>	<b>26 %</b>
8.1	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	60 kegiatan	24 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	6 kegiatan	42 kegiatan	70 %
8.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	5 kegiatan	125%
8.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	6 kegiatan	150 %



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
8.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 Kegiatan	8 Kegiatan	160 %
8.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	23375 berkas	9350 berkas	4675 berkas	4675 berkas	100 %	3906 berkas	17931 berkas	76,7 %

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wagir**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Wagir, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Wagir dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wagir selama kurun waktu tahun 2010-2015 cukup mengembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Wagir yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Wagir tahun 2016 – 2018, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat kelancaran proses administrasi kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2021 sesuai perubahan Renstra terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wagir;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Musrenbangcam.

Adapun untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wagir baik target Renstra maupun capaian kinerja ,lebih detail dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wagir</b>												
1	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			95 %	-	-	-	95 %	97%	-	-	
2	Prosentase kelancaran proses administrasi kependudukan a. KTP b. KK c. Pindah tempat			100 % 100 % 100%	- - -	- - -	- - -	100 % 100 % 100%	- - -	- - -	- - -	
3	Prosentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			97 %	-	-	-	97 %	-	-	-	
4	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan di Kecamatan Wagir			-	77%	78%	79%	-	77%	78%	79%	
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam			-	80%	81%	82%	-	80%	81%	8%	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)											
	<b>Penyediaan Alat tulis Kantor</b> Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)			72 jenis	72 jenis	72 jenis	72 jenis	72 jenis	72 jenis	72 jenis	72 jenis	
	<b>Penyediaan Jasa kebersihan</b> Jumlah Petugas Kebersihan (OB)			12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	
	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b> Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan(jenis)			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	
	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			240 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	
	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b> Jumlah jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang			16 unit	10 unit	10 unit	10 unit	16 unit	10 unit	10 unit	10 unit	







No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>SKPD</b> Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP, profil kinerja PD/survey kepuasan masyarakat (buku))											
	<b>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b> Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)			5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku	
10	<b>Program peningkatan pelayanan kecamatan</b> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	<b>Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan			-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	
	<b>Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan</b>			-	6 fasilitasi	6 fasilitasi	6 fasilitasi	-	6 fasilitasi	6 fasilitasi	6 fasilitasi	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD</li> <li>- Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa</li> </ul>			-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	
	<b>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan kepemudaan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan			-	11 fasilitasi	11 fasilitasi	11 fasilitasi	-	11 fasilitasi	11 fasilitasi	11 fasilitasi	
	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Jumlah kegiatan penyelenggaraan</li> </ul>			-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
				-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Musrenbangcam											
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses			-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Permasalahan yang ada Kecamatan Wagir dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Pemerintahan Daerah, pada hal Pemerintah Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi masyarakat;
- f. Terkendala sistem jaringan internet yang sering kali tidak ada konektifitas;
- g. Ada gangguan teknis seperti lampu padam sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan;
- h. Adanya sosialisasi yang dilakukan ke warga masyarakat tetapi masyarakat belum paham dengan maksud dan tujuan sosialisasi.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Wagir secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a. Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c. Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih

banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan sekali.

2. *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3. *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Pagak tidak ada permasalahan.

4. *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

**b. Bidang Pelayanan Publik ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )**

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ), meliputi :

1) Perizinan.

Jenis – jenis Perizinan antara lain :

1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);
3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
5. Izin Reklame Insidental;
6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
10. Izin Reklame Insidental;
11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan Perizinan – perizinan sebagaimana diatas.

*Upaya yang telah dilakukan :*

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;
- b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana pedoman yang berlaku ;
- c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;

d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

*Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :*

a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai dengan prosedur ;

b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

3) Pindah Tempat

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektorial tentang pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda, Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut ( luar kota ) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan :*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 ( dua ) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas

pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah ( luar Kota ).

**c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

a. *Urusan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki permasalahan :*

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam



peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Wagir dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
  - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Wagir antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>596.903.000,00</b>						<b>596.903.000,00</b>		
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>596.903.000,00</b>						<b>596.903.000,00</b>		
4.406.76	<b>KECAMATAN WAGIR</b>				<b>596.903.000,00</b>						<b>596.903.000,00</b>		
4.406.76.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>		
4.406.76.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	12 Kegiatan	51.052.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	12 Kegiatan	51.052.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	2 Kegiatan	30.190.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	2 Kegiatan	30.190.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	18.345.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	18.345.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.76.0 1.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	50.400.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	50.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 1.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	Kecamatan Wagir	4675 Berkas	14.273.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	Kecamatan Wagir	4675 Berkas	14.273.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.76.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>		
4.406.76.0 2.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Wagir	117 Buah	7.980.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Wagir	117 Buah	7.980.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wagir	12 Bulan	17.400.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wagir	12 Bulan	17.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.76.0 2.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wagir	60 OB	109.575.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wagir	60 OB	109.575.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wagir	12 OB	19.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wagir	12 OB	19.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kecamatan Wagir	10 Unit	1.640.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kecamatan Wagir	10 Unit	1.640.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	25 Jenis	17.387.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	25 Jenis	17.387.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	6 Jenis	14.845.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	6 Jenis	14.845.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wagir	2 Jenis	2.250.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wagir	2 Jenis	2.250.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	27 Jenis	18.360.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	27 Jenis	18.360.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	4.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	4.200.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.76.0 2.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wagir	1950 HOK	53.686.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wagir	1950 HOK	53.686.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 2.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wagir	292 HOK	91.120.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wagir	292 HOK	91.120.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.76.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>		
4.406.76.0 3.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	16.613.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	16.613.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 3.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wagir	2 Unit	22.300.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wagir	2 Unit	22.300.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 3.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	6.467.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	6.467.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.76.0 3.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wagir	1 Unit	1.350.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wagir	1 Unit	1.350.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4.406.76.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>		
4.406.76.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	
4.406.76.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Wagir	57 Stel	20.520.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Wagir	57 Stel	20.520.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.76.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>		
4.406.76.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Wagir	12 Orang	6.000.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Wagir	12 Orang	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.76.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>		
4.406.76.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wagir	100 Buku	1.750.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wagir	100 Buku	1.750.000,00	APBD Kabupaten	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wagir sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019. Hasil usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) yang terinput di Aplikasi e-Musrenbang. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.4 :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Para Pemangku**  
**Kepentingan Tahun 2020**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Wagir sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk

mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Wagir**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wagir terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Wagir adalah :

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Wagir dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam

Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain :

“Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Wagir”.

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Pagak melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- m. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

#### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

**5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kepemudaan ;
- d. Pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN WAGIR**  
**TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					596.903.000,00				596.903.000,00
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				596.903.000,00				596.903.000,00
<b>4.406</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				596.903.000,00				596.903.000,00
<b>4.406.76</b>	<b>KECAMATAN WAGIR</b>				596.903.000,00				596.903.000,00
<b>4.406.76.01</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>
4.406.76.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	12 Kegiatan	51.052.000,00	APBD Kabupaten		12 Kegiatan	51.052.000,00
4.406.76.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	2 Kegiatan	30.190.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	30.190.000,00
4.406.76.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	18.345.000,00	APBD Kabupaten		3 Kegiatan	18.345.000,00
4.406.76.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	50.400.000,00	APBD Kabupaten		3 Kegiatan	50.400.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.76.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas): 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	Kecamatan Wagir	4675 Berkas	14.273.000,00	APBD Kabupaten		4675 Berkas	14.273.000,00
<b>4.406.76.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>
4.406.76.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Wagir	117 Buah	7.980.000,00	APBD Kabupaten		117 Buah	7.980.000,00
4.406.76.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wagir	12 Bulan	17.400.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	17.400.000,00
4.406.76.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten		- Unit	0
4.406.76.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wagir	60 OB	109.575.000,00	APBD Kabupaten		60 OB	109.575.000,00
4.406.76.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wagir	12 OB	19.200.000,00	APBD Kabupaten		12 OB	19.200.000,00
4.406.76.02.06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kecamatan Wagir	10 Unit	1.640.000,00	APBD Kabupaten		10 Unit	1.640.000,00
4.406.76.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	25 Jenis	17.387.000,00	APBD Kabupaten		25 Jenis	17.387.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.76.02.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	6 Jenis	14.845.000,00	APBD Kabupaten		6 Jenis	14.845.000,00
4.406.76.02.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wagir	2 Jenis	2.250.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	2.250.000,00
4.406.76.02.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	27 Jenis	18.360.000,00	APBD Kabupaten		27 Jenis	18.360.000,00
4.406.76.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	4.200.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	4.200.000,00
4.406.76.02.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wagir	1950 HOK	53.686.000,00	APBD Kabupaten		1950 HOK	53.686.000,00
4.406.76.02.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wagir	292 HOK	91.120.000,00	APBD Kabupaten		292 HOK	91.120.000,00
<b>4.406.76.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>
4.406.76.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	16.613.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	16.613.000,00
4.406.76.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wagir	2 Unit	22.300.000,00	APBD Kabupaten		2 Unit	22.300.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.76.03.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	6.467.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	6.467.000,00
4.406.76.03.04	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wagir	1 Unit	1.350.000,00	APBD Kabupaten		1 Unit	1.350.000,00
<b>4.406.76.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>
4.406.76.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten		- Unit	0
4.406.76.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Wagir	57 Stel	20.520.000,00	APBD Kabupaten		57 Stel	20.520.000,00
<b>4.406.76.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>
4.406.76.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Wagir	12 Orang	6.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Orang	6.000.000,00
<b>4.406.76.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>
4.406.76.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wagir	100 Buku	1.750.000,00	APBD Kabupaten		100 Buku	1.750.000,00



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WAGIR**

Rencana Kerja Kecamatan Wagir serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi:

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020**  
**KECAMATAN WAGIR**  
**KABUPATEN MALANG**

NOMER	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					596.903.000,00		
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				596.903.000,00		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				596.903.000,00		
	<b>KECAMATAN WAGIR</b>				596.903.000,00		
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		100%	164.260.000,00		
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	12 Kegiatan	51.052.000,00	APBD Kabupaten	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	2 Kegiatan	30.190.000,00	APBD Kabupaten	

	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	18.345.000,00	APBD Kabupaten	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Kecamatan Wagir	3 Kegiatan	50.400.000,00	APBD Kabupaten	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	Kecamatan Wagir	4675 Berkas	14.273.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Wagir	117 Buah	7.980.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wagir	12 Bulan	17.400.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wagir	60 OB	109.575.000,00	APBD Kabupaten	

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wagir	12 OB	19.200.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kecamatan Wagir	10 Unit	1.640.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	25 Jenis	17.387.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wagir	6 Jenis	14.845.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wagir	2 Jenis	2.250.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	27 Jenis	18.360.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	4.200.000,00	APBD Kabupaten	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wagir	1950 HOK	53.686.000,00	APBD Kabupaten	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wagir	292 HOK	91.120.000,00	APBD Kabupaten	

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	16.613.000,00	APBD Kabupaten	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wagir	2 Unit	22.300.000,00	APBD Kabupaten	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Wagir	1 Jenis	6.467.000,00	APBD Kabupaten	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wagir	1 Unit	1.350.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>		
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	Kecamatan Wagir	- Unit	0	APBD Kabupaten	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Wagir	57 Stel	20.520.000,00	APBD Kabupaten	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Wagir	12 Orang	6.000.000,00	APBD Kabupaten	

6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		100%	1.750.000,00		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wagir	100 Buku	1.750.000,00	APBD Kabupaten	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran per triwulan**  
**Kecamatan Wagir**  
**Tahun 2020**

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>	20	30	30	20	
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	12 Kegiatan	51.052.000,00	20	30	30	20	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	2 Kegiatan	30.190.000,00	20	30	30	20	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	3 Kegiatan	18.345.000,00	20	30	30	20	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	3 Kegiatan	50.400.000,00	20	30	30	20	
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	4675 Berkas	14.273.000,00	20	30	30	20	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>	20	30	30	20	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	117 Buah	7.980.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	17.400.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	- Unit	0	20	30	30	20	



NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	109.575.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	19.200.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	1.640.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	17.387.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	14.845.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 Jenis	2.250.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	27 Jenis	18.360.000,00	20	30	30	20	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.200.000,00	20	30	30	20	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1950 HOK	53.686.000,00	20	30	30	20	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	292 HOK	91.120.000,00	20	30	30	20	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>	20	30	30	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	16.613.000,00	20	30	30	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	22.300.000,00	20	30	30	20	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	1 Jenis	6.467.000,00	20	30	30	20	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	1.350.000,00	20	30	30	20	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>	20	30	30	20	
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	- Unit	0	20	30	30	20	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	57 Stel	20.520.000,00	20	30	30	20	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	20	30	30	20	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	12 Orang	6.000.000,00	20	30	30	20	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>	20	30	30	20	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100 Buku	1.750.000,00	20	30	30	20	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Wagir Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dan dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pada Tahun 2020, Racangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini terdapat 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

<b>Tujuan / Sasaran / Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wagir	$\frac{\text{Total dari Nilai per Unsur}}{\text{Penimbang Total Unsur yang Diisi}} \times \text{Nilai}$
<b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Presentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / Perwakilan dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$
<b>Program :</b> Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Wagir	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Direncanakan}} \times 100\%$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Presentase Tingkat Partisipasi /Perwakilan dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang Yang Diterima Musrenbangkab}}{\text{Jumlah Usulan dalam usrenbangcam}} \times 100\%$	90%	91%	-	-	-
2.	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Usulan yang Diterima}} \times 100\%$	100%	100%	-	-	-
3.	Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	$\frac{\text{Jumlah Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Siskamling}} \times 100\%$	95%	97%	-	-	-
4.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wagir	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Diisi}} \times 100\%$	-	-	77%	78%	79%
5.	Presentase Tingkat Kehadiran Partisipasi/Perwakilan dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	81%	82%

